

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DESA
BOMO KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI
(Studi Deskriptif pada Masyarakat desa Bomo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten
Banyuwangi)**

Leni Widiyanti¹, Yuli kartika effendi²
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UNIBA
Email : Yulikartikaefendi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa Bomo kecamatan blimbingsari kabupaten banyuwangi. Yang selama ini belum diketahui, menyangkut kinerja pemerintahan desa Bomo. Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dengan responden terdiri dari pegawai desa dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa Bomo kecamatan blimbingsari kabupaten banyuwangi cukup baik, hal ini dibuktikan dengan pelayanan yang diberikan pegawai desa kepada masyarakat. Kinerja pemerintahan desa Bomo cukup baik. Masyarakat sangat puas dengan layanan yang diberikan pegawai desa. Pegawai desa dalam memberikan layanan kepada masyarakat cepat dan tepat waktu.

Kata kunci : *Presepsi Masyarakat, Kinerja Pemerintahan Desa*

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU NO.6 2014 pasal 1 ayat 2). Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintahan kabupaten.

Aspek terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah kedudukan kepala desa sebagai pemimpin dan dibantu oleh perangkat desa pada saat melaksanakan tugas, kewajiban dan fungsinya (Solekhan, 2014, hlm. 17).

Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa dan di bantu oleh perangkat desa yang dalam menjalankan tugasnya terdapat pembatasan. Perangkat desa terdiri

dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi budaya masing-masing desa. Pemerintahan desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat, pembinaan perekonomian, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan desa berfungsi sebagai pengayom, pembina, pelayanan, dan penerak partisipasi masyarakat. Masyarakat desa baik secara kelompok maupun individu memerlukan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat di penuhi sendiri, seperti pelayanan dalam hal kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pernikahan, warisa, kelahiran dan perizinan. Penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan pada asas, kepastian, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepetingan umum, keterbukaan proposioanlitas, akuntabilitas, efesiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif (UU No. 6 tahun 2014 pasal 24). Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan yang berkualitas dari pemerintah.

Perkembangan di desa Bomo sangat maju sekali dibandingkan dulu pada tahun 2014. Di tahun 2014 pemerintah di desa Bomo, ketika masyarakat ingin membuat surat keterangan mereka harus datang ke kantor desa. Tetapi pada tahun 2018 staf desa lebih modern karena masyarakat tidak susah

ketika ingin membuat surat keterangan. Di desa Bomo menyediakan pelayanan seperti berikut: Surat Keterangan Untuk Nikah (SKUN), Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Pengantar SKCK, Surat Pengantar Kartu Keluarga, Surat Keterangan Penganti Nama, Surat Keterangan Pemasangan Listrik (bagi orang tidak mampu), Surat Pengantar KTP, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan Surat Keterangan Pindah Alamat Rumah dan Surat Keterangan Datang.

Pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah melibatkan seluruh aparat desa makin terasa dengan adanya peningkatan kesadaran bernegara dan masyarakat, maka pelayanan telah meningkat kedudukannya di mata masyarakat dan menjadi suatu hak, yaitu hak atas pelayanan. Namun ternyata hak masyarakat atau perorangan untuk memperoleh pelayaan dari aparat pemerintah terasa belum dapat memnuhi harapan semua pihak, baik masyarakat itu sendiri maupun pemerintah dan pelayanan umum menjadi budaya masyarakat. Masih selalu ditemui kelemahan-kelemahan yang dampaknya sering merugikan masyarakat yang menerima pelayanan. Maka dari itu pemerintah desa Bomo melakukan perubahan dengan cara, semua urusan yang berkaitan dengan keterangan apapun bisa melalui handphone. Jadi masyarakat akan

lebih mudah untuk mengurus surat keterangan tidak susah payah datang ke kantor desa, terkadang juga ada masyarakat yang datang ke kantor desa untuk mengurus surat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, mengingat objek penelitian ini adalah pegawai desa dan masyarakat desa Bomo (Sugiyono, 2017, hlm.8). Berpedapat bahwa penelitian kualitatif yang memusatkan pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat actual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat.

Pada saat melakukan penelitian kualitatif, peneliti memerlukan teknik dalam pengumpulan data. Teknik sampel menggunakan *sampling purposive*, menurut Sugiyono (2017, hlm, 225). *Sampling purposive* adalah teknik pengumpulan data sampel dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan tertentu. Menurut teknik ini cocok digunakan untuk penelitian kualitatif dan penelitian yang tidak menuntut adanya hasil generalisasi. Peneliti ini menjadikan beberapa subjek penelitian sebagai berikut:

1. Pegawai desa Bomo
2. Masyarakat desa Bomo

Instrumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara dan dokumentas. Untuk memudahkan penelitian, maka harus melalui beberapa tahapan penelitian agar hasil yang didapatkan maksimal dan sesuai dengan harapan. Adapun tahapan tersebut meliputi tahap persiapan penelitian, tahap perizinan penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyusunan laporan.

Kemudian analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduksi data, penyajian data dan kesimpulan(Sugiyono,2017, hlm.249

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di kantor desa. Desa Bomo memiliki visi misi" Menciptakan masyarakat yang aman, tentera, adem ayem sejahtera, makmur, dan

bermasyarakat yang dilandasi akhlak mulia, iman, dan taqwa".

Misi

1. Meningkatkan peran dan kinerja BPD Lembaga Desa dengan Kepala Desa
2. Meningkatkan SDM Perangkat Desa dan Lembaga Desa dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.
3. Memberikan pelayanan yang tepat, dan tidak diskriminatif.
4. Meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
5. Menciptakan kerukunan antar umat beragama, yang berwawasan pada nilai luhur, seni, dan budaya

Kinerja Pemerintahan Desa Bomo Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kinerja pegawai desa kepada masyarakat cukup baik dan memuaskan masyarakat desa Bomo. Kinerja di desa Bomo dapat kita lihat dari bentuk pelayanan yang diberikan pegawai desa kepada masyarakat yang puas dengan kinerja pemerintahan desa. Pelayanan suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap manusia itu sendiri.

Bentuk-bentuk pelayanan yang ada di desa Bomo:

1. Surat Pengantar KTP
2. Surat Keterangan Kematian
3. Surat Pengantar SKCK
4. Surat Keterangan Kelahiran
5. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
6. Surat Pengantar Kartu Keluarga
7. Surat Keterangan Penganti Nama
8. Surat Keterangan Pemasangan Listrik, Mampu Masyarakat Yang Kurang Mampu
9. Surat Keterangan Pindah Alamat Rumah dan Surat Keterangan Datang
10. Surat Keterangan Untuk Nikah (SKUN)
11. Surat Mendirikan Bangunan

Kualitas pelayanan yang ada di desa Bomo dilihat dari kinerja pegawai desa. Pelayanan desa tidak terlepas dari keramahan dan kedisiplinan pegawai desa. Pegawai desa ramah dan tempat waktu ketika melaksanakan tugas. Meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di desa Bomo dengan cara mengadakan pelatihan terhadap pegawai desa dan memberikan informasi kepada masyarakat. Meningkatkan sumber daya manusia suatu proses mendayugunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi. Dengan cara meningkatkan tingkat pendidikan pendidikan di masyarakat desa Bomo, dan

melalui UKM atau usaha kecil menengah yang sekarang yang di adakah di desa. Sekarang di pantai kedunen sudah ada orang yang berjualan di pantai. Tetapi jalan di desa masing banyak yang rusak terutama di jalan-jalan yang sempit, padahal dana desa sangat besar untuk majunya suatu desa.

Di desa juga ada pelatihan-pelatihan bagi pegawai desa dan masyarakat. Pelatihan bagi pegawai desa yaitu menghadiri seminar dan untuk masyarakat yaitu pelatihan untuk mengembangkan individu dalam bentuk peningkatan keterampilan dan berkaitan dengan karir. Pelatihan yang ada di desa Bomo yaitu Pelatihan mesin, Pelatihan membuat kue dan pelatihan mensablun kaos. Setelah sspelatihan itu selesai sama masyarakat desa Bomo tidak di pergunakan lagi. Jadi keahlian itu dibiarkan begitu saja. Faktor yang utama yang menyebabkan itu terjadi karena faktor uang, masyarakat kekurangan uang untuk memulai usahan yang baru. Seharusnya pegawai desa bisa mengelola masyarakat yang mengikuti pelatihan itu agar bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari untuk menambah keuangan masyarakat itu sendiri. Sehingga hidup masyarakat lebih sejaterah.

Persepsi Masyarakat Desa Bomo Tentang Kinerja Pemerintahan Desa

Kehidupan bermasyarakat tidak akan lepas dari persepsi masyarakat itu sendiri.

Persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari seseorang. Masyarakat desa Bomo berhak untuk menyampaikan pendapat tentang persepsi masyarakat tentang kinerja pemerintahan desa. Pelayanan yang diberikan pegawai desa kepada masyarakat sangat baik dan memuaskan masyarakat desa Bomo. Sikap pegawai desa kepada masyarakat ramah dan sopan. Masyarakat desa Bomo sangat puas dengan pelayanan yang diberikan pegawai desa kepada masyarakat. Pelayanan yang ada di desa Bomo yaitu

1. Surat Pengantar KTP
2. Surat Keterangan Kematian
3. Surat Pengantar SKCK
4. Surat Keterangan Kelahiran
5. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
6. Surat Pengantar Kartu Keluarga
7. Surat Keterangan Penganti Nama
8. Surat Keterangan Pemasangan Listrik, Mampu Masyarakat Yang Kurang Mampu
9. Surat Keterangan Pindah Alamat Rumah dan Surat Keterangan Datang
10. Surat Keterangan Untuk Nikah (SKUN)
11. Surat Mendirikan Bangunan

Peneliti telah melakukan wawancara kepada perwakilan masyarakat desa Bomo yang berjumlah 26 orang. Berdasarkan

pendapat dari 26 orang yang di wawancarai diperoleh pula data secara kuantitatif yaitu sebanyak 26 orang. 76% Masyarakat itu puas dengan pelayanan yang diberikan pegawai desa Bomo dalam memberikan pelayanan sangat baik, ramah, sopan dan cepat. 24% kurang puas dengan pelayanan yang diberikan pegawai desa karena masyarakat kurang memperhatikan informasi dari pegawai desa, jadi masyarakat harus bolak balik untuk meneuhin persyarakat dari desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa Bomo kecamatan blimbingsari kabupaten banyuwangi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

Kinerja pemerintahan desa Bomo terhadap masyarakat cukup baik, hal ini tunjukan oleh sikap pegawai desa saat ada masyarakat yang minta layanan. Layanan di desa Bomo di bukan mulai jam 08.00, sikap pegawai desa kepada masyarakat cukup ramah sopan dan cepat waktu. Adapun jenis layaanan yang diberikan pegawai desa meliputi:

1. Surat Pengantar KTP
2. Surat Keterangan Kematian
3. Surat Pengantar SKCK
4. Surat Keterangan Kelahiran

5. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
6. Surat Pengantar Kartu Keluarga
7. Surat Keterangan Penganti Nama
8. Surat Keterangan Pemasangan Listrik, Mampu Masyarakat Yang Kurang Mampu
9. Surat Keterangan Pindah Alamat Rumah dan Surat Keterangan Datang
10. Surat Keterangan Untuk Nikah (SKUN)
11. Surat Mendirikan Bangunan

Namun di sisi lain untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan desa dengan cara memperbaiki sumber daya manusia (SDM) dan diadakan pelatihan untuk pegawai desa dan masyarakat.

Persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa cukup baik, masyarakat sangat puas terhadap pelayanan yang diberikan pegawai desa. Pegawai desa memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat sopan, ramah dan cepat.

Saran

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seharusnya pegawai desa mengadakan pelatihan secara rutin kepada masyarakat
2. Perlu membuat papan informasi yang memuat syarat administratif yang lebih jelas dan penambahan pegawai khusus

bagian informasi, agar masyarakat lebih tertib dalam administrasi pendaftaran.

3. Perlu penataan ruang yang lebih memberikan kesan tidak terlalu sempit, sehingga menambah nilai keindahan dari kantor tersebut.

4. Perlu adanya peningkatan sarana yang dapat membuat waktu penyelesaian pelayanan lebih efisien, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Asmawati, I. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Pengelolaan Dana Desa(studi pada desa dore kecamatan palibelo kabupaten bima). *Akuntansi Universitas Udayana vol.25,3 Desember* , 2.

Agus Dwiyanto (ed). (2010). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Facheza, S. M. (2018). Pengaruh Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan dan Dampaknya Pada Kinerja Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh. *Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis unsyiah, Volumen 2015/ 181, 6.*

Heriyanto, (2015). Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul. *Falkultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Hal 5*

Ni matul huda, s. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.

Moch. Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.

mardiyasari, d. p. (2015). Persepsi Masyarakat Mengenai Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Bangunharjo Sewon Bantul. *citizenship, vol.2 januari 2015|181* , 6.

musnadi, s. (2018). Pengaruh Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan dan Dampak Pada Kinerja Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh. *Magister manajemen fakultas ekonomi dan bisnis unsyiah* , 5.

Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Dalam Penyusunan Rahayu, S. (2010). Persepsi Pemerintahan Daerah Kota Jambi Terhadap Partisipasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Partisipasi Masyarakat, Vol 12. Nomor 2, hal 29-34

Ridwan Novandy. (2009). Analisis persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada bagian administrasi kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat pemerintah kabupaten simalugun. Tesis. Universitas Sumatera Utara

sari, d. l. (2016). Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara. *kKnerja Aparatur Desa* , 15.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Solekhan, D. M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. 57: Setara Press.

Suhardi. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Pendudukan Kota Batam. *Benefita* 3(1) februari , 1.

Zalihur Mukmin, R. S. (2018). *Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Suak Rebee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat*. *um. ac. id/index. phpfpk*, vol 3. Juni 2018

Wati. (2019). Visi Misi Desa Bomo. Seketaris Desa.